

# Pemerintah Tingkatkan Manfaat Infrastruktur

*Pemerintah berupaya menggenjot ketersediaan infrastruktur nasional agar kontribusinya mendekati rata-rata global sebesar 70% terhadap PDB.*

**TESA OKTIANA SURBAKTI**  
*Tesa@mediaindonesia.com*

**P**EMBANGUNAN infrastruktur jadi salah satu program prioritas pemerintah. Selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana seperti jalan, pelabuhan, bandara, juga dapat meningkatkan daya saing.

Sejauh ini, dari ketersediaan infrastruktur yang dibangun dan

sudah beroperasi hingga 2012 lalu, kontribusinya baru berkisar 38% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Posisi itu, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, tidak banyak berubah sampai tahun ini.

“Di zaman Orde Baru sebelum krisis 1998, kontribusi infrastruktur terhadap PDB pernah 49% atau

hampir separuh dari PDB negara,” ujar Bambang di perhelatan PINA Day 2018, kemarin. PINA merupakan singkatan dari pembiayaan infrastruktur non-anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Skema itu merupakan salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang digagas Bappenas.

Bambang mengungkapkan saat ini kontribusi pembangunan infrastruktur nasional jauh tertinggal dari negara lain. Sebab, ia mencatat, rata-rata stok infrastruktur global ada di kisaran 70% terhadap PDB tiap-tiap negara. “Jepang itu bahkan di atas 100%, lebih besar dari PDB-nya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata dia, pembangunan infrastruktur tidak bisa

lagi ditunda apabila Indonesia ingin menjadi negara maju. Pemerintah berupaya menggenjot ketersediaan infrastruktur nasional agar kontribusinya mendekati rata-rata global sebesar 70% terhadap PDB.

“Perlu diingat dampak dari pembangunan infrastruktur itu memakan waktu jangka menengah sampai jangka panjang. Jika pertumbuhan infrastruktur tidak bisa mengikuti pertumbuhan PDB, kita khawatir pertumbuhan (ekonomi) di Indonesia tidak akan *sustainable*,” tegasnya.

Dia berharap gencarnya pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, kontribusinya setidaknya bisa mencapai 40%-50% terhadap PDB pada 2019.

## Peran swasta

Dalam peta jalan pembangunan infrastruktur 2015-2019, investasi yang dibutuhkan mencapai Rp4.796 triliun. Dari kalkulasi pemerintah, kemampuan APBN untuk menutup gap pembangunan infrastruktur hanya berkisar 41,3% atau setara Rp1.969,6 triliun. Artinya, pembangunan infrastruktur membutuhkan peran swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Dari pemetaan Bappenas, kontribusi BUMN diproyeksi 22% atau sebesar Rp1.058,7 triliun, sedangkan peran swasta lebih besar lagi yakni mencapai 36,5% atau senilai Rp1.740,7 triliun.

Untuk mengakomodasi investor di sektor infrastruktur, pemerintah pun menelurkan mekanisme PINA yang digadag-gadag sebagai alternatif pembiayaan. CEO PINA Ekoputro Adijayanto mengungkapkan dari total 34 proyek infrastruktur yang masuk *pipeline* PINA, sebagian proyek ada yang menjadi prioritas di 2018. Misalnya, proyek pengembangan PLTU Batubara 2x200 Mw di Meulaboh, Aceh, dengan nilai proyek Rp7,5 triliun, yang telah berhasil mengumpulkan ekuitas tahap awal sebesar Rp1 triliun. (E-2)